

HAK POLITIK PEREMPUAN MENURUT YUSUF AL-QARDHAWI

Skripsi

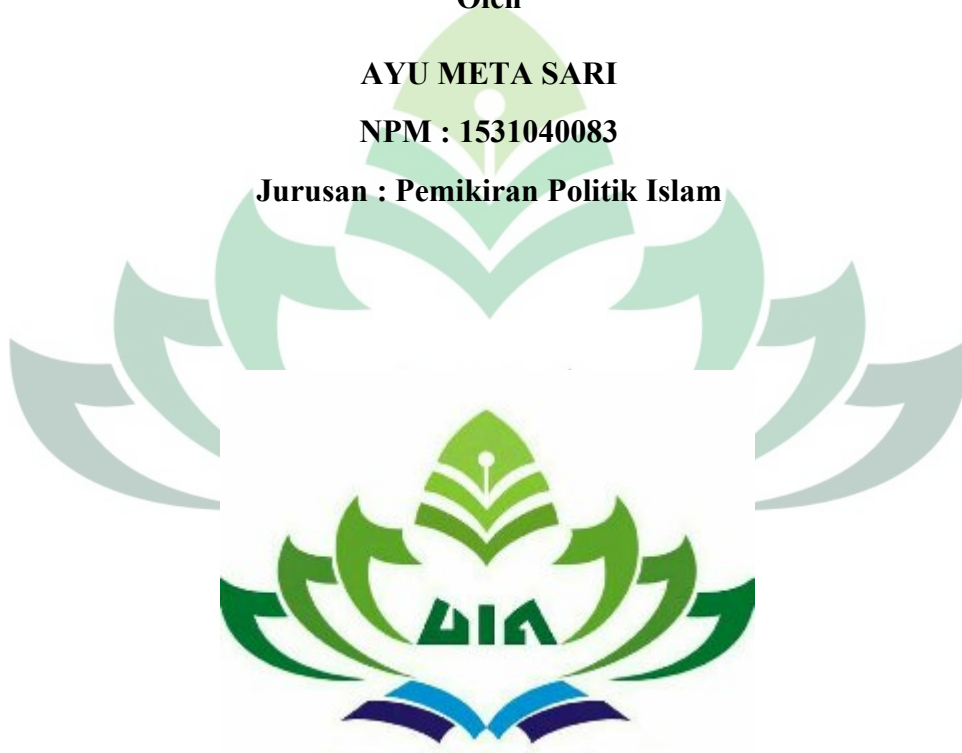
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana SI
dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama

Oleh

AYU META SARI

NPM : 1531040083

Jurusan : Pemikiran Politik Islam



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

1441 H/2020

HAK POLITIK PEREMPUAN MENURUT YUSUF AL-QARDHAWI

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana SI
dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama

Oleh

AYU META SARI

NPM : 1531040083

Jurusan : Pemikiran Politik Islam



Pembimbing I : Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, LC. M.Ag

Pembimbing II : Drs. Agustamsyah, M.IP

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1441 H/2020

ABSTRAK

HAK POLITIK PEREMPUAN MENURUT YUSUF AL-QARDHAWI

Oleh :

AYU META SARI

Di kalangan ahli fiqh, peran wanita dalam politik selalu mengundang perdebatan dan perbedaan pendapat. Ini terjadi karena secara eksplisit, al-Qur'an dan al-Sunnah tidak menyebutkan dengan tegas perintah maupun larangan bagi wanita untuk menjadi pemimpin. Mayoritas ulama fiqh terutama dari kalangan salaf hampir sepakat melarang wanita untuk menjadi pemimpin mereka, dengan alasan firman Allah yang menegaskan bahwa "Kaum lelaki adalah pemimpin bagi perempuan, dan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari menyatakan bahwa "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang perempuan". Lain halnya dengan pandangan ahli fiqh kontemporer kenamaan Yusuf al-Qardhawi yang melihat bahwa dalil-dalil di atas tidak sebatas tekstual, melainkan harus diperhatikan pula konteksnya, sehingga menurutnya, penerapan dalil tersebut tidak pada tempatnya. Karena itu, beliau memandang bahwa perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam hal bernegara. Penelitian ini membahas Hak Politik Perempuan Menurut Yusuf Al-Qardhawi adapun rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama, bagaimana pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang hak politik perempuan? Dan yang ke dua, apakah yang menjadi tantangan dan peluang politik perempuan menurut Yusuf Al-Qardhawi? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Jenis penelitian ini yaitu kepustakaan (library research), dan sifat penelitiannya yakni deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder, dalam data primer penulis menggunakan buku-buku karangan Yusuf Al-Qardhawi dan dalam data sekunder penulis menggunakan buku-buku karangan orang lain dan jurnal yang berkaitan dengan Yusuf Al-Qardhawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan menurut Yusuf Al-Qardhawi boleh menjalani perpolitikan, baik di wilayah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dengan berdasarkan pada ayat al-Qur'an surat at-Taubah ayat 71 mengenai kewajiban menjalankan amar ma'ruf nahi munkar bagi setiap laki-laki dan perempuan. Namun pada kesimpulan akhir meskipun Yusuf Al-Qardhawi membolehkan perempuan menjalani perpolitikan akan tetapi ada batasan-batasan atau waktu tertentu yang harus dilewati bagi kaum perempuan yang ingin memasuki wilayah eksekutif, legislatif, yudikatif.

PERNYATAAN KEASLIAN

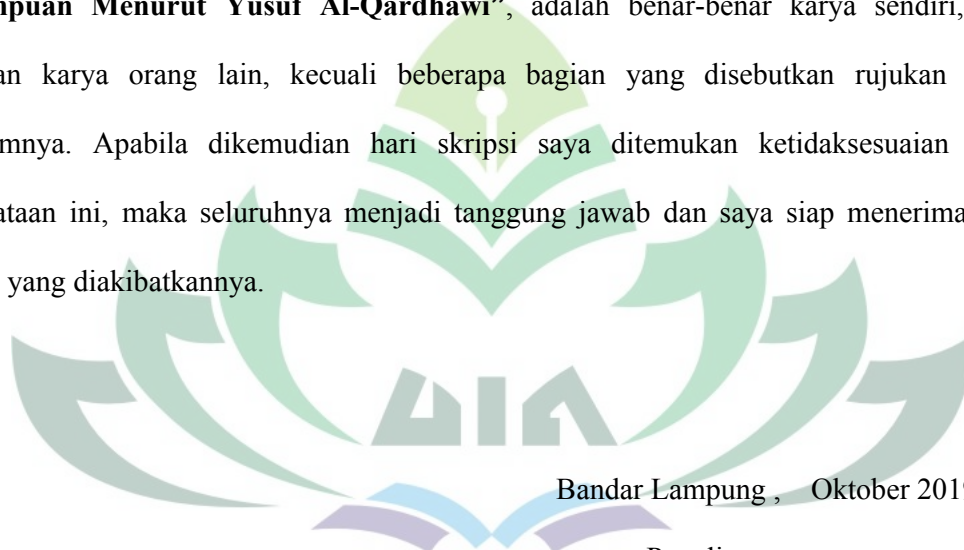
Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Ayu Meta Sari

NPM : 1531040083

Program Studi : Pemikiran Politik Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini yang berjudul **“Hak Politik Perempuan Menurut Yusuf Al-Qardhawi”**, adalah benar-benar karya sendiri, bukan jiplakan karya orang lain, kecuali beberapa bagian yang disebutkan rujukan sumber didalamnya. Apabila dikemudian hari skripsi saya ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka seluruhnya menjadi tanggung jawab dan saya siap menerima segala sanksi yang diakibatkannya.



Bandar Lampung , Oktober 2019

Penulis

Ayu Meta Sari

NPM. 1531040083



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp(0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : HAK POLITIK PEREMPUAN MENURUT YUSUF
AL - QARDHAWI

Nama Mahasiswa: Ayu Meta Sari

NPM : 1531040083

Jurusan : Pemikiran Politik Islam

Fakultas : Ushuluddin Dan Studi Agama

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosahkan dan dipertahankan dalam Ujian Munaqosah
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, L.C., M.Ag

Drs. Agustamsyah, M.IP

NIP. 195808231993031001

NIP. 1968010419940310003

Mengetahui

Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam

Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si

NIP. 197801302011012004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"HAK POLITIK PEREMPUAN MENURUT YUSUF AL-QARDHAWI"** Disusun oleh **AYU META SARI, NPM : 1531040083,**

Program Studi : **PEMIKIRAN POLITIK ISLAM,** telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung

pada Hari/Tanggal : **Senin/23 Desember 2019**

TIM/DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Idrus Ruslan, M.Ag

Sekretaris : Eska Prawisudawati Ulpa, M.Si

Penguji Utama : Dr. Nadirsah Hawari, M.A

Penguji Pendamping I : Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, LC., M.Ag

Penguji Pendamping II : Drs. Agustamsyah, M.I.P

Mengetahui
Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama



Dr. H. M. Afif Anshori, M.Ag
NIP. 196003131989031004

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

(Q.S al – Hujurat : 13)

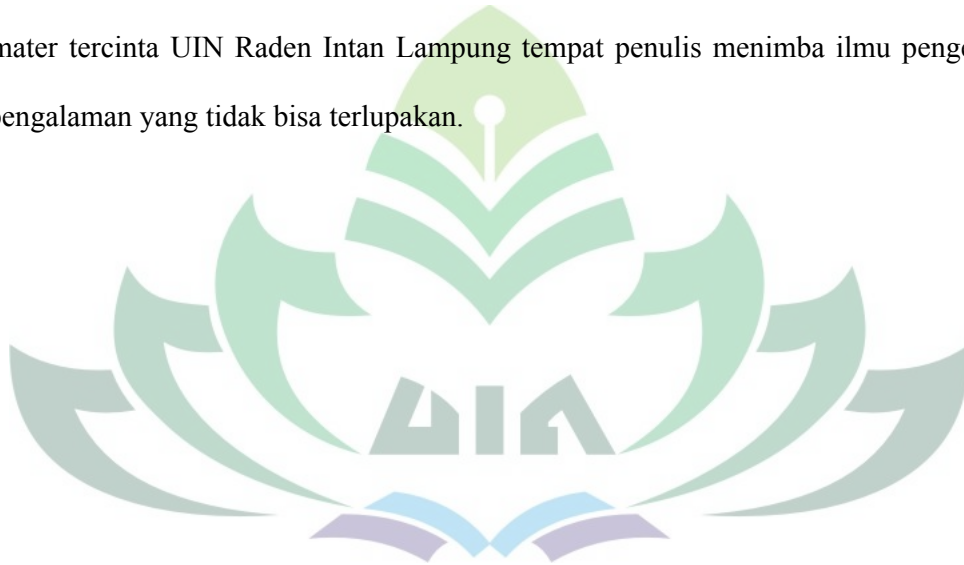


PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Kedua orang tuaku, Mama dan Abi, Kakak dan Adikku, Jaan dan Vanny atas segala pengorbanan, kesabaran, kasih sayang, dan do'anya yang tulus selama ini. Seluruh keluarga besar atas dukungan dan semangatnya. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung tempat penulis menimba ilmu pengetahuan serta pengalaman yang tidak bisa terlupakan.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Ayu Meta Sari di lahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 27 Mei 1997, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Usman Tabrani dan Ibu Maya Merkes.

Penulis menempuh pendidikan dasar pada tahun 2004 di SDN 2 Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 8 Bandar Lampung. Kemudian pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 15 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung pada Jurusan Pemikiran Politik Islam. Selama menjadi mahasiswa penulis mengikuti organisasi, pada tahun 2015 tergabung di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), pada tahun yang sama penulis juga tergabung pada UKM-F GEMANAS Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama. Penulis juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2018 di Desa Sriwungu Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu.

Bandar Lampung
Yang Membuat,

Ayu Meta Sari
NPM. 1531040083

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena rahmat, ridho, dan hidayah-Nya, sehingga penulis masih diberi kesehatan, kekuatan, petunjuk dan kemudahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Hak Politik Perempuan Menurut Yusuf Al-Qardhawi”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana sosial pada Prodi Pemikiran Politik Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis sangat menyadari bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan hati yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepadayang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Bapak M. Afif Anshori, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Drs. H. Arsyad Sobby Kesuma, LC. M.Ag dan Bapak Drs. Agustamsyah, M.IP selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, ilmu pengetahuannya, saran terhadap skripsi ini menjadi lebih baik.
4. Ibu Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si selaku pembimbing akademik yang memberikan arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.

6. Terima Kasih pada sahabat-sahabatku tercinta Ngah Resti, Laras, Dimas dan Nanda yang telah memberikan motivasi, dukungan, dan doa untuk terus berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima Kasih untuk teman-teman PPI B angkatan 2015 khususnya Nadia, Nopi, Yuni, Alinu, Anita yang telah menemani dan membantu selama masa perkuliahan.
8. Terima Kasih untuk BTS yang telah memberikan motivasi, semangat, dan energi positif untuk terus berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, Kepala Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, dan Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung atas diperkenankannya penulis meminjam literatur yang dibutuhkan.
10. Teman-teman KKN 2018 kelompok 247 yang telah memberi semangat dan dukungan.
11. Almamater tercinta dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu demi terselesainya skripsi ini.

Semoga atas bantuan dan jerih dari semua pihak menjadi catatan ibadah disisi Allah SWT, Amin.

Bandar Lampung

Penulis

Ayu Meta Sari

NPM:1531040083

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	4
C. Latar Belakang Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian	11
BAB II PEREMPUAN DAN POLITIK DALAM ISLAM	
A. Perempuan Dalam Islam.....	14
1. Kedudukan Perempuan	14
2. Peran Perempuan Dalam Islam	17
B. Politik Dalam Islam	23
1. Kedudukan Politik Dalam Islam	23
2. Tujuan Politik Islam	24
3. Posisi Perempuan Dalam Islam	26
C. Tinjauan Pustaka	29
BAB III BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN POLITIK YUSUF AL-QARDHAWI	
A. Biografi Yusuf Al-Qardhawi	31
B. Karya-Karya Yusuf Al-Qardhawi	38
C. Pemikiran Politik Yusuf Al-Qardhawi	39

BAB IV HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI

- A. Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Hak Politik Perempuan 45
- B. Tantangan Dan Peluang Politik Perempuan Menurut Yusuf Al-Qardhawi 55

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 59
- B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan hal yang sangat penting dari karya ilmiah, karena judul ini akan memberikan gambaran tentang keseluruhan isi skripsi. Adapun judul karya ilmiah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah : “**Hak Politik Perempuan Menurut Yusuf Al-Qardhawi**”.

Mempertegas istilah-istilah judul diatas secara rinci agar dapat di mengerti dan untuk menghindari salah pengertian dalam memahami maksud skripsi ini, terlebih dahulu akan penulis uraikan beberapa istilah pokok terkandung dalam judul tersebut. Hal ini selain di maksudkan untuk lebih mempermudah pemahaman, juga untuk mengarahkan pada pengertian yang jelas sesuai dengan yang dikehendaki penulis. Berikut ini dapat dijelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul.

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.¹ Politik menurut ilmu politik, adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan (decision making) apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu

¹ Arsyad Sobby Kesuma, Angga Natalia, *Teori-Teori Politik*, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan, 2014), h.3

menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan yang telah dipilih.²

Hak Politik : Hak Politik Warga Negara merupakan bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dimana asas kenegaraannya menganut asas demokrasi. Lebih luas hak politik itu merupakan bagian dari hak turut serta dalam pemerintahan. Hak turut serta dalam pemerintahan dapat dikatakan sebagai bagian yang amat penting dari demokrasi. Hak ini bahkan dapat dikatakan sebagai pengejawantahan dari demokrasi, sehingga jika hak ini tidak ada dalam suatu negara, maka negara tersebut tidak semestinya mengakui diri sebagai negara demokratis. Negara-negara yang menganut demokrasi, pada umumnya mengakomodir hak politik warga negaranya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung.

Beberapa hak-hak dasar politik yang inti bagi warga negara diantaranya; hak mengemukakan pendapat, hak berkumpul, dan hak berserikat. Dalam UUD 1945, tercantum adanya keberadaan hak politik sipil dalam beberapa pasal. Pada pasal 27 ayat (1) mengenai persamaan kedudukan semua warga negara terhadap hukum dan pemerintahan; pasal 28 tentang kebebasan, berkumpul dan menyatakan pendapat; dan pasal 31 ayat (1) tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan.³

² Miriam Budiardjo, *Dasar – dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: 1985) h. 8

³ Miriam Budiardjo, *Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global*, Jurnal Ilmu Politik, No. 10 (Jakarta: 1990), hlm. 37.

Hak-hak politik masyarakat Indonesia yang dijamin oleh UUD, yaitu hak membentuk dan memasuki organisasi politik ataupun organisasi lain yang dalam waktu tertentu melibatkan diri ke dalam aktivitas politik; hak untuk berkumpul, berserikat, hak untuk menyampaikan pandangan atau pemikiran tentang politik, hak untuk menduduki jabatan politik dalam pemerintahan, dan hak untuk memilih dalam pemilihan umum, yang mana semuanya direalisasikan secara murni melalui partisipasi politik.⁴

Syaikh Prof. DR. Yusuf bin Muhammad Al-Qardhawi lahir 9 September 1926 adalah seorang teolog dan cendekiawan muslim dan dikenal juga sebagai ahli tafsir. Lahir di Kairo sekarang beliau menetap di Qatar. Popularitas Qardhawi sebagai seorang ulama terkemuka zaman ini, banyak yang mengakui. Ia menekuni di banyak disiplin ilmu, pemikiran, dakwah, pendidikan dan jihad. Kontribusinya sangat dirasakan umat di seluruh dunia. Pengabdianya untuk Islam tidak terbatas pada suatu sisi atau medan tertentu.

Aktivitasnya sangat beragam dan sangat luas serta melebar ke berbagai bidang dan sisi yaitu, bidang ilmu pengetahuan, fiqh dan fatwa, dan dakwah.. Secara umum Qardhawi melihat bahwa perempuan layak memperoleh hak-hak dalam partisipasi politik sebagaimana halnya laki-laki. Berbeda dengan sebagian besar ulama fiqh, ia juga melihat bahwa perempuan berhak menduduki jabatan-jabatan politik baik sebagai eksekutif atau legislatif, sebagai pemilih atau dipilih.

⁴ *Ibid*, h,38

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa “Hak Politik Perempuan Dalam Politik Menurut Yusuf Al-Qardhawi” adalah pembahasan yang diharapkan dapat mengungkap pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam politik.

B. Alasan Memilih Judul

1. Secara Objektif

Keterlibatan perempuan dan politik merupakan perbincangan yang akan terus dibahas dari masa ke masa. Politik sering dianggap bukan topik pembicaraan yang cocok bagi perempuan, dan sering kali pula politik dan perempuan dianggap tidak berkaitan satu dengan yang lain. Keterlibatan perempuan yang minim di politik diikuti dengan kurangnya keinginan perempuan untuk terlibat di dunia politik.

2. Secara Subjektif

Permasalahan dalam judul penelitian ini berkaitan dengan program studi yang penulis tempuh di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama. Dan didukung dengan literatur dan referensi yang memadai sehingga diharapkan dapat mempermudah menyelesaikan skripsi.

C. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sangat memuliakan dan menjunjung tinggi derajat perempuan. Islam telah menjelaskan kedudukan perempuan sama dengan laki-laki. Mereka diwajibkan beribadah kepada Allah SWT, menjalankan kewajibannya, menegakkan agama dan ber- amar ma'ruf nahi munkar.⁵ Al-qur'anul karim menugaskan sesama manusia baik laki-laki maupun perempuan untuk berkerja sama dalam menegakkan dan memperbaiki masyarakat.⁶ Ketika islam hadir, risalah disebarkan oleh Rasulullah SAW, mulailah kita melihat para perempuan dihormati dan dimuliakan. Hal-hal ini lah yang dapat kita lihat bahwa perempuan dalam islam sangat dilindungi dan dihormati. Perempuan harus memiliki kesempatan yang sama (*equal opportunity*) dalam berinteraksi didalam ruang publik, perempuan bukan musuh, lawan atau saingan laki-laki, masing-masing sebagai pelengkap bagi satu dan lainnya.

Dalam ajaran islam, masalah politik termasuk dalam kajian fiqh siyasah. Fiqh siyasah adalah salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernaftaskan ajaran islam. Al Quran tidak menyatakan secara eksplisit bagaimana sistem politik itu muncul, tetapi menegaskan bahwa kekuasaan politik dijanjikan kepada orang-orang

⁵ Dr. Yusuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995) hlm.521

⁶ *Ibid*, hlm.522

beriman dan beramal shaleh. Ini berarti kekuasaan politik terkait dengan kedua factor tersebut.

Sistem pemerintahan islam sudah dimulai sejak masa Rasulullah SAW. Dua tahun setelah hijrah dari mekkah ke madinah, tepatnya pada tahun 622 M, Rasulullah SAW bersama seluruh komponen masyarakat Madinah memaklumkan piagam yang disebut Piagam Madinah. Beberapa prinsip politik islam berisi: mewujudkan persatuan dan kesatuan bermusyawarah, menjalankan amanah dan menetapkan hukum secara adil atau dapat dikatakan bertanggung jawab, mentaati Allah, Rasulullah dan Ullil Amr (pemegang kekuasaan) dan menepati janji.⁷

Para wanita juga memainkan peranannya pada masa nabi Muhammad SAW, bahkan suara pertama yang membenarkan dan mendukung beliau adalah suara wanita, yaitu Khadijah RA. Bahkan orang yang pertama kali mati syahid di jalan islam juga seorang wanita, yaitu Sumayyah, ibu Ammar. Bahkan diantara mereka ada yang ikut berperang bersama nabi Muhammad SAW, pada waktu perang Uhud, Hunain, dan lain-lainnya, hingga dalam biografi Al-Bukhari disebutkan bab peperangan dan pertempuran para wanita.

Sumber daya perempuan merupakan sumber daya manusia potensial dan strategis untuk dikembangkan. Dengan demikian, sumber daya perempuan perlu dikembangkan. Namun keterlibatan perempuan dalam segala lapangan kehidupan dan pekerjaan di luar rumah, masih

⁷ Abdullah Zawawi, "Politik Dalam Pandangan Islam", Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015 hlm. 93

banyak mendapat tantangan, baik dengan dalih agama ataupun karena budaya.

Tentang hak perempuan dalam politik ada yang melarang dan memperbolehkan, mereka yang melarang mempunyai argumen sebagai berikut:⁸

1. Pernyataan al-Qur'an tentang laki-laki menjadi pemimpin atas perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian perempuan (QS. Al-Nisa'/4:34). Laki-laki mempunyai derajat lebih tinggi dari perempuan (QS. Al-Baqarah/2:288) dan persaksian dua orang perempuan sebagai ganti satu orang laki-laki (QS. Al-Baqarah/2:282).
2. Hadis Nabi menyebutkan "Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan suatu urusan kepada perempuan". (HR. Bukhari). Dan hadis yang menyebutkan perempuan kurang akalunya dan kurang agamanya. (HR. Muslim).
3. Sebagian kitab tafsir telah menjelaskan laki-laki memimpin perempuan, dialah pemimpinnya, pembesarnya, hakimnya, dan pendidiknya, apabila menyimpang, karena laki-laki lebih utama dari perempuan, laki-laki lebih baik dari perempuan. Keutamaan laki-laki atas perempuan bermula dari sebab fitrah (asal mula) dan berpuncak pada sebab kasbiah (usaha), Keutamaan (Fadl) laki-laki atas perempuan dalam empat hal:

⁸ Maimun, "Kontroversi Wanita Menjadi Pemimpin: Kajian Analisis Metodologis" hlm.3

kecerdasan akal (kamâl al-‘Aql), kemampuan manajerial (khusn al-tadbîr), keberanian berpendapat (wazanah al-ra’yi) dan kelebihan kekuatan fisik (mawazidu al-quwah). Oleh karena kenabian (nubuwwah), kepemimpinan (imâmah), kekuasaan (wilayah), persaksian (syahadah) dan jihad dikhususkan laki-laki.

4. Kitab fiqh menurut Wahbah al-Zuhaili, syarat kepala negara adalah laki-laki, demikian juga Abul al-A’la al-Maududi mengharamkan perempuan duduk dalam seluruh jabatan penting pemerintahan. Lebih-lebih jabatan kepala negara.

Sedangkan mereka yang memperbolehkan mempunyai pendapat sebagai berikut:⁹

1. Pernyataan al-Qur’an tentang orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong atau ahlinya sebagian yang lain, mereka menyuruh mengerjakan yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar (Al-Qur’an surat Al-Taubah/9:71). Sesungguhnya aku menjumpai seorang perempuan yang memerintah mereka dan dia dianugrahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar (al-Qur’an surat al-Naml/27:23), seorang perempuan adalah Ratu Balqis yang memerintah di negeri Saba’.

⁹ Maimun, "Kontroversi Wanita Menjadi Pemimpin: Kajian Analisis Metodologis" hlm.4

2. Hadis “Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan kepada perempuan” perlu diteliti sanadnya, dan hadis tersebut termasuk hadis ahad. Kalaupun dianggap sahih hendaknya ditempatkan pada konteks pengucapan Nabi yang berkaitan dengan tidak mampunya Buron binti Syiwaraih memimpin kerajaan Persia.

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, patut dipertanyakan tentang pendapat yang tidak membolehkan perempuan berpolitik, sebab terkesan menganggap perempuan tidak mempunyai kemampuan dalam berpolitik dan menjadi pemimpin atau memegang jabatan, padahal kalau diteliti secara cermat dan seksama dasar dan argumennya kurang akurat.

Dalam hazanah pemikiran Islam, menarik untuk dilihat pandangan Yusuf al-Qardhawi, terutama dalam bukunya Fatwa-fatwa kontemporer jilid II dan Fiqh Al-Daulah. Secara umum Qardhawi melihat bahwa muslimah layak memperoleh hak-hak dalam partisipasi politik sebagaimana halnya kaum muslimin dan berpendapat bahwa agama Islam adalah sebuah sistem hidup pertama yang membebaskan kaum perempuan dari perbudakan masa lalu sebuah agama pertama yang bersikap obyektif terhadap kaum perempuan dan memuliakan mereka, baik dalam kapasitas mereka sebagai seorang manusia, seorang perempuan, seorang anak, juga sebagai seorang istri dan anggota masyarakat.

Yusuf al-Qardhawi juga telah mengeluarkan sebuah fatwa, yang mana dalam fatwanya tersebut Yusuf al-Qardhawi memperbolehkan seorang perempuan untuk memilih di dalam pemilihan umum atau mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif, dan lain sebagainya.

Dalam beberapa karyanya, Qardhawi menegaskan, “bahwa sebaiknya kita mengambil pelajaran dari berbagai konsep, pemikiran dan pengalaman orang lain yang bermanfaat bagi kita, selama tidak bertentangan dengan nash yang tegas dan kaidah syara’ yang baku. Kita menelaah berbagai konsep dan pemikiran lain itu, lalu kita menambah dan mengurangi, serta memasukkan ke dalamnya nilai luhur, sehingga hal itu menjadi bagian dari pemikiran dan konsep kita”. Dalam menilai sesuatu kita tidak berpatokan pada nama, tapi kepada makna.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang hak politik perempuan ?
2. Apakah yang menjadi tantangan dan peluang politik perempuan menurut Yusuf Al-Qardhawi ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Kita tahu bahwa setiap usaha yang kita lakukan memiliki tujuan, sama halnya dengan karya ilmiah ini memiliki tujuan yaitu :

- a. Untuk mengetahui pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang hak politik perempuan.
- b. Untuk mengetahui tantangan dan peluang politik perempuan menurut Yusuf Al-Qardhawi

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Menjelaskan bahwa hasil penelitian berguna untuk menambah sumbangan pemikiran tentang perempuan diruang publik menurut islam.

b. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan khazanah keilmuan khususnya bidang politik islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini lebih menuntut kejelasan penelitian serta sangat menekankan terhadap aspek analisa dan kajian teks, dalam menggunakan buku dan literatur lainnya dalam mencari dan informasi dan data.

b. Sifat Penelitian

Bersifat kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku dan orang-orang yang dapat diamati.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama bersangkutan memerlukannya. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data-data pokok berdasarkan karya-karya Yusuf al-Qardhawi yang berjudul Fakwa – fatwa Kontemporer Jilid 2 dan Fikih Daulah , jurnal, ensiklopedia, atau sejenisnya yang terkait dengan objek pembahasan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang sudah ada atau telah dipublikasikan untuk umum, serta referensi-referensi sebagai pelengkap dan pendukung.

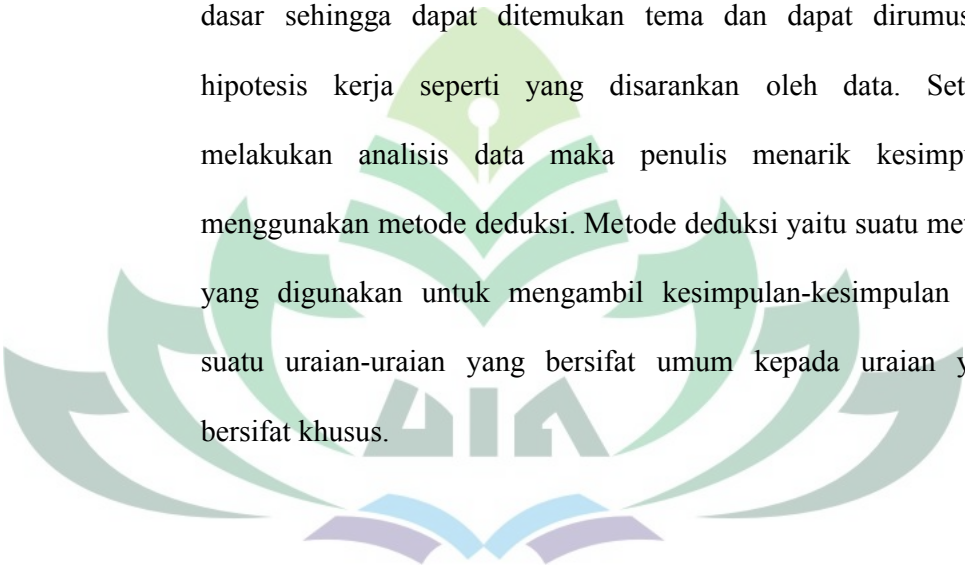
3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data atau library research (studi pustaka). Data yang digunakan dalam penelitian adalah terdiri atas bahan-bahan pustaka yang bisa di dapat di perpustakaan-perpustakaan seperti buku, artikel, jurnal, dan lain-lain yang

berisikan tulisan atau pendapat para pakar dan hal-hal yang memiliki kesesuaian dengan permasalahan yang menjadi obyek kajian penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengurutkan dan mengorganisasikan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Setelah melakukan analisis data maka penulis menarik kesimpulan menggunakan metode deduksi. Metode deduksi yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan dari suatu uraian-uraian yang bersifat umum kepada uraian yang bersifat khusus.



BAB II

PEREMPUAN DAN POLITIK DALAM ISLAM

A. Perempuan Dalam Islam

1. Kedudukan Perempuan

Sebelum Islam datang, perempuan sangat menderita dan tidak memiliki kebebasan hidup yang layak. Dalam peradaban Romawi misalnya, wanita sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya, setelah kawin, kekuasaan tersebut pindah ke tangan sang suami.¹⁰ Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh. segala hasil usaha wanita, menjadi hak milik keluarganya yang laki-laki. Dalam Undang-undang India juga perempuan tidak memiliki hak untuk menyukai dan mencintai. Semenjak kecil mereka diharuskan untuk mengikuti kemauan orang tuanya.

Pada masa mudanya mereka harus mengikuti kemauan suaminya dan ketika suaminya meninggal mereka harus mengikuti semua keinginan putra-putranya. Dalam masyarakat Makkah di masa Jahiliyah, seorang ayah boleh saja membunuh anaknya sekiranya lahir perempuan.¹¹ Pada zaman itu ada keyakinan bahwa setiap anak

¹⁰ Agustin Hanapi, "Peran Perempuan Dalam Islam" *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol 1, No 1, Maret 2015 hal. 16

¹¹ *Ibid*, hal 17

perempuan yang lahir harus dibunuh, karena khawatir nantinya akan kawin dengan orang asing atau orang yang berkedudukan sosial rendah misalnya budak atau mawali. Begitu juga halnya di Eropa, kondisi perempuan tidak lebih baik dari sebelumnya, misalnya pada abad kelima atau sebelas Masehi, di Inggris kaum laki-laki terbiasa menjual istrinya. Penguasa Gereja telah memberikan hak kekuasaan pada para suami untuk memberikan istrinya kepada laki-laki lain untuk sementara waktu, baik dengan mendapatkan upah maupun tidak.

Begitu Islam datang, perempuan diberikan hak-haknya sepenuhnya yaitu dengan memberi warisan kepada perempuan, memberikan kepemilikan penuh terhadap hartanya, bahkan tidak boleh pihak lain ikut campur kecuali setelah mendapat izin darinya. Dalam tradisi Islam, perempuan mukallaf dapat melakukan berbagai perjanjian, sumpah, dan nazar, baik kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan,¹² dan tidak ada suatu kekuatan yang dapat menggugurkan janji, sumpah, atau nazar mereka sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Ma'idah {5}: 89.

Perempuan juga diberikan kebebasan secara penuh dalam menentukan pasangan hidupnya, bahkan walinya dilarang menikahkannya secara paksa, maka sebuah pernikahan seorang gadis tidak akan terlaksana apabila belum mendapatkan izin dan persetujuannya. Perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang

¹² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, (Jakarta: Paramadina, Cet. II, 2010), hlm. 122.

sama di depan hukum, bahkan Islam memberikan hak yang sama kepada perempuan dalam mengakhiri kehidupan berumah tangga yaitu dengan cara “khulu”.¹³ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Islam merupakan agama yang sangat menghormati dan menghargai perempuan dan laki-laki di hadapan Allah secara mutlak. Islam menghapus tradisi Jahiliyah yang begitu diskriminatif terhadap perempuan, dalam Islam laki-laki dan perempuan dianggap sebagai makhluk Allah yang setara, bebas ber-tasarruf, bahkan satu sama lain saling melengkapi dan membutuhkan.

Al-Qur'an mengajarkan kedudukan orang beriman baik laki-laki maupun perempuan itu sama di hadapan Allah, oleh karena itu mereka harus memperoleh status yang setara dimata Tuhan, dan keduanya telah dideklarasikan secara sama dengan mendapatkan rahmat Allah. Dengan demikian, akan terlihat bahwa status perempuan telah ditunjukkan setara dengan laki-laki. Juga, kedua jenis kelamin tersebut akan diberi pahala secara sama karena amalan baik mereka, dan tidak ada perbedaan apapun yang akan dibuat antara mereka. Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, satu sama lainnya adalah kawan, dan keduanya melakukan apa yang telah diperintahkan Allah.

Islam sangat revolusioner dalam mengangkat derajat dan posisi perempuan.¹⁴ Nabi Saw berusaha melepaskan belenggu tradisi

¹³ Agustin Hanapi, “Peran Perempuan Dalam Islam” *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol 1, No 1, Maret 2015 hal. 17

¹⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, (Jakarta: Paramadina, Cet. II, 2010), hlm. 124.

Jahiliyah pada saat itu, yaitu mengangkat harkat perempuan. Ini terlihat dalam ayat-ayat Al-Quran dan perilaku Nabi terhadap perempuan, baik isteri-isterinya, anak-anaknya maupun sahabatnya. Konsep perempuan dalam Al-Quran secara jelas dan tegas menyatakan posisi dan peran perempuan setara laki-laki. Yang dimuliakan di sisi Allah bukan perbedaan jenis kelamin, akan tetapi nilai ketakwaan. Al-Quran juga jelas mengatakan perempuan adalah partner (pasangan, saudara kembar, saudara kandung) sehingga kedudukan serta hak-haknya hampir dapat dikatakan sama. Kalaupun ada perbedaan hanyalah akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin, sehingga perbedaan yang ada tidaklah mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan daripada yang lain.

2. Peran Perempuan Dalam Islam

Sebagian orang tua merasa bahwa pendidikan kaum laki-laki lebih diprioritaskan karena memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam rumah tangga dan masyarakat di kemudian hari, kemudian tidak ada hambatan dalam artian bebas mau kemanapun tanpa ada kekhawatiran yang menimpanya seperti trafficking, pelecehan dan lain-lain. Maka sebagian orang tua lebih memfokuskan pendidikan anak laki-laki, lalu berusaha menyekolahkan ke jenjang yang lebih tinggi. Berbanding terbalik dengan pendidikan anak perempuan, yang hanya sekadarnya, karena adanya pandangan bahwa anak perempuan

kelak akan ditugaskan di dalam rumah untuk melayani suami dan anak-anaknya.

Kalau dilihat dari segi kehambaan antara laki-laki dan wanita di sisi Allah yang Maha Adil, maka sesungguhnya Allah tidak membedakan dua jenis makhluk tersebut. Yang membedakan antara mereka adalah semata-mata perbuatan baik dan perbuatan buruk yang dilakukan oleh masing-masing.¹⁵ Surga dijadikan bukan untuk kaum pria saja, sedang kaum wanita dianggap tidak bisa memasukinya. Seorang kepala negara yang mempunyai kekuasaan yang sangat luas dibanding dengan rakyat biasa yang tidak mempunyai apa-apa adalah sama kedudukannya di mata Allah, keduanya sebagai hamba-Nya yang harus bertanggung jawab nanti di hadapan pengadilan-Nya yang Maha Adil.

Laki-laki dan wanita seperti yang disebut di atas tidak dibedakan, sama-sama berhak masuk surga, sama-sama diperbolehkan turut (partisipasi) berlomba memperoleh kebajikan, mengabdikan kepada masyarakat dan agama.

Memang ada jabatan-jabatan penting yang tidak dikurniakan oleh Allah kepada kaum wanita seperti jabatan kenabian dan kerasulan, akan tetapi bukankah yang melahirkan para nabi dan para rasul itu adalah kaum wanita? Begitu juga terhormatnya Maryam ibu nabi Isa as, sehingga disebutkan dalam Al-Qur'an dengan panggilan seorang

¹⁵ DewanDakwah.or.id, "Peranan Wanita Dalam Islam" (<https://dewandakwah.or.id/peranan-wanita-dalam-islam/>) di akses pada Oktober 2019)

wanita saleh dan bertaqwa. Demikian juga Asiah dan Mashitah di zaman Fir'aun, Siti Khadijah dan Aisyah di zaman nabi Muhammad Saw dan Rabiah al-Adawiyah di zaman tabi'in (zaman sesudah sahabat).

Banyak lagi kaum wanita yang secara aktif turut menegakkan kebenaran dan memberikan andil dalam usaha perbaikan di dunia: Pada waktu permulaan menegakkan agama Islam, nabi Muhammad dibantu dan didukung oleh istrinya, Siti Khadijah.¹⁶ Sungguh pun bagi kaum wanita kurang dibenarkan; untuk mengendalikan jabatan khalifah baik dilakukan sendirian maupun bersama kaum pria, namun pada permulaan Islam terdapat banyak wanita terpelajar dan terkemuka, bahkan banyak pula di antara mereka yang melebihi kaum pria, seperti Ummul Mukminin (Ibu orang beriman), yaitu istri-istri Nabi Muhammad. Kekurangan yang ada pada diri kaum wanita tidak akan mengurangi derajatnya, karena masih banyak jabatan-jabatan penting yang dapat dipegangnya sesuai dengan kondisi kewanitaannya. Pada umumnya sifat dan kondisi kaum pria lebih kuat dan lebih dapat bersabar dari kaum wanita, karena itu Allah memberikan tanggung jawab kepada kaum pria sebagai pembela kaum wanita.¹⁷

Akan tetapi dengan tabiat wanita yang lemah lembut sebagai kurnia Allah dapat dipandang sebagai faktor pengimbang kaum pria dalam kehidupan, wanita dapat melakukan apa yang tidak dapat

¹⁶ DewanDakwah.or.id, "Peranan Wanita Dalam Islam" (<https://dewandakwah.or.id/peranan-wanita-dalam-islam/>) di akses pada Oktober 2019)

¹⁷ M. Quraish Shihab, Perempuan, Jakarta: Lentera Hati, 2006, Cet. III, hlm. 406.

dikerjakan oleh pria, seperti mengatur rumah tangga, mengasuh anak-anak dan lain-lain. Kemudian adanya kekhawatiran terhadap mereka kalau disekolahkan ke tempat yang lebih jauh kurangnya rasa aman, perlindungan, dan lain-lain. Kemudian ada juga pandangan bahwa perempuan tidak boleh berpergian melebihi tiga hari kecuali didampingi oleh mahramnya.¹⁸ Kemudian ada ayat Alquran yang dipahami secara literal sehingga dijadikan dasar untuk menghalangi perempuan keluar rumah, seperti Q.S. al-Ahzab: 33:

Artinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Pandangan semacam ini sungguh keliru dan bertentangan dengan ajaran agama karena Allah telah menjanjikan bagi siapapun baik laki-laki maupun perempuan yang serius dalam menuntut ilmu akan mendapat derajat dan kedudukan lebih tinggi dan mulia.

Pada masa Nabi Saw perempuan sangat tekun belajar, mereka meminta agar Nabi memberi waktu tertentu guna belajar, dan permintaan mereka dikabulkan Nabi Saw.¹⁹ Untuk itu perempuan juga dituntut untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri, apalagi

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, Cet. III, hlm. 407

¹⁹ *Ibid*, hlm. 359

salah satu tugas utama perempuan adalah mendidik anak-anaknya karena memiliki sifat keibuan yang luar biasa, namun bagaimana tugas pokok itu dapat mereka laksanakan secara baik jika mereka tidak diberi kesempatan untuk belajar. Karena tidak cukup hanya dengan mengandalkan kelembutan namun juga dibutuhkan kecerdasan yang dapat diperoleh melalui belajar. Terkadang anak-anak kerap melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang mengagumkan tentang berbagai hal termasuk tentang ketuhanan, alam raya, maka pengetahuan akan hal-hal itu harus dimiliki oleh perempuan. Karena perempuan ibarat sekolah yang apabila dipersiapkan dengan baik, maka mereka akan melahirkan generasi yang cerdas.²⁰ Memang ada larangan Nabi Saw bagi perempuan untuk berpergian tanpa “mahram”, tetapi larangan itu harus dipahami berdasar illat (motif), bukan sekadar bunyi teksnya.

Larangan tersebut disebabkan oleh kekhawatiran terjadinya gangguan terhadap mereka di perjalanan, atau ikut sertanya setan merangsang untuk melakukan dosa, atau timbulnya isu negatif dari kepergiannya sendiri tanpa ditemani oleh mahram. Oleh karena itu kepergian perempuan untuk studi walau tanpa mahram dapat dibenarkan selama terjamin kehormatan dan keselamatannya serta tidak mengundang kemaksiatan. Jadi hadis di atas sifatnya sangat

²⁰ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, Cet. III, hlm. 359.

kondisional, jadi perlu disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang berlaku.

Perempuan mempunyai hak untuk bekerja selama ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara. Selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta mereka dapat memelihara agamanya dan dapat pula menghindarkan dampak-dampak negatif pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Demikian terlihat bahwa mewajibkan perempuan di rumah tidak boleh keluar kecuali karena adanya darurat dinilai oleh Alquran sebagai hukuman. Pandangan-pandangan yang melarang sama sekali perempuan keluar rumah tidak dapat bertahan atau dipertahankan. Mengabaikan perempuan dan tidak melibatkannya dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat berarti menyia-nyiakan paling tidak setengah dari potensi masyarakat.²¹

Bahkan pada zaman dahulu banyak sekali perempuan yang aktif bekerja dan beraktivitas dan Nabi sendiri tidak melarangnya. Dalam bidang perdagangan misalnya, Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai seorang perempuan yang sukses.²² Demikian juga Qilat Ummi Bani Anmar yang tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang kepada Nabi meminta petunjuk-petunjuk jual-beli. Zainab binti Jahsy juga aktif bekerja menyamak kulit binatang dan hasil usahanya

²¹ Agustin Hanapi, "Peran Perempuan Dalam Islam" *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol 1, No 1, Maret 2015 hal. 21

²² M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, Cet. III, hlm. 407

itu beliau sedekahkan. Raithah, istri sahabat Nabi yang bernama Abdullah Ibnu Mas'ud sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Sementara itu, Al-Syifa, seorang perempuan yang pandai menulis ditugaskan oleh Khalifah Umar r.a. sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah.²³

B. Politik Dalam Islam

1. Kedudukan Politik Dalam Islam

Terdapat tiga pendapat di kalangan pemikir muslim tentang kedudukan politik dalam syariat islam. Yaitu :²⁴

Pertama, kelompok yang menyatakan bahwa Islam adalah suatu agama yang serbah lengkap didalamnya terdapat pula antara lain sistem ketatanegaraan atau politik. Kemudian lahir sebuah istilah yang disebut dengan fikih siyasah (sistem ketatanegaraan dalam islam) merupakan bagian integral dari ajaran islam. Lebih jauh kelompok ini berpendapat bahwa sistem ketatanegaraan yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh nabi Muhammad SAW dan oleh para khulafa al-rasyidin yaitu sistem khilafah.

Kedua, kelompok yang berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat. Artinya agama tidak ada hubungannya dengan kenegaraan. Menurut aliran ini nabi Muhammad hanyalah seorang

²³ *Ibid*, hlm. 407

²⁴ Abdullah Zawawi, S.Pd., MM., M.Pd, "Politik Dalam Pandangan Islam" Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015 hlm. 95

rasul, seperti rasul-rasul yang lain bertugas menyampaikan risalah tuhan kepada segenap alam. Nabi tidak bertugas untuk mendirikan dan memimpin suatu Negara.

Aliran Ketiga menolak bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap yang terdapat didalamnya segala sistem ketatanegaraan, tetapi juga menolak pendapat bahwa islam sebagaimana pandangan barat yang hanya mengatur hubungan manusia dengan tuhan. Aliran ini berpendirian bahwa dalam islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.

2. Tujuan Politik Islam

Tujuan sistem politik Islam ialah untuk membangunkan sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syari'at Islam. Tujuan utamanya ialah untuk menegakkan sebuah negara Islam atau Darul Islam.

Dengan adanya pemerintahan yang mendukung syari'ah, maka akan tertegaklah al Din dan berterusanlah segala urusan manusia menurut tuntutan tuntutan al Din tersebut.²⁵

- a. Para fuqaha Islam telah menggariskan sepuluh perkara penting sebagai tujuan kepada sistem politik dan pemerintahan Islam.
- b. Memelihara keimanan menurut prinsip prinsip yang telah disepakati oleh 'ulama' salaf daripada kalangan umat Islam

²⁵ Abdullah Zawawi, S.Pd., MM., M.Pd, "Politik Dalam Pandangan Islam" Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015 hlm. 98

- c. Melaksanakan proses pengadilan di kalangan rakyat dan menyelesaikan masalah di kalangan orang-orang yang berselisih
- d. Menjaga keamanan daerah-daerah Islam agar manusia dapat hidup dalam keadaan aman dan damai
- e. Melaksanakan hukuman-hukuman yang ditetapkan syara' demi melindungi hak-hak manusia
- f. Menjaga perbatasan negara dengan pelbagai persenjataan bagi menghadapi kemungkinan serangan daripada pihak luar
- g. Melancarkan jihad terhadap golongan yang menentang Islam
- h. Mengendalikan urusan pengutipan cukai, zakat dan sedekah sebagai mana yang ditetapkan oleh syara'
- i. Mengatur anggaran belanja dan perbelanjaan daripada perbendaharaan negara agar tidak digunakan secara boros ataupun secara kikir.
- j. Mengangkat pegawai-pegawai yang cekap dan jujur bagi mengawal kekayaan negara dan menguruskan hal ehwal pentadbiran negara
- k. Menjalankan pengaulan dan pemeriksaan yang rapi di dalam hal ehwal umum demi untuk memimpin negara dan melindungi al Din.

3. Posisi Perempuan Dalam Politik

Islam telah memberikan hak perundang-undangan kepada wanita sama seperti memberikan kepada pria. Kaum wanita boleh menguasai hak milik, hak jual beli, hibah, mengadakan perjanjian dan lain sebagainya. Secara penuh wanita diberi hak berpolitik, boleh menempati sebagai kepala negara walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini, dan menguasai urusan hukum, serta boleh berpartisipasi dalam memilih kepala negara atau pemimpin umat. Ia boleh berperanserta dalam aktivitas politik dan sosial sebagaimana partisipasi kaum pria. Wanita juga boleh berpartisipasi mengelola yayasan, organisasi dan partai. Selain itu ia tidak dilarang menempati kursi kementerian. Parlemen dan kursi politik yang lain.²⁶

Jadi, wanita menurut Islam dapat menikmati hakekat kewanitaannya sesuai undang-undang dan memikul tanggung jawab sendiri, lepas dari ikatan ayah, suami atau lainnya. Di zaman Rasulullah saw, wanita pun ikut berhijrah dengan tujuan politik. Berjihad dalam peperangan dengan memberi minum para prajurit, melayani, mengobati orang terluka, serta mengantarkan orang terluka dan terbunuh ke Madinah. Wanita juga memberikan sumbang saran

²⁶ Abdul Hadi, "Posisi Wanita dalam Sistem Politik Islam Perspektif Fenomelogi" An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak Volume 12, Nomor 01, Juni 2017, hlm.12

tentang isu politik, seperti Ummu Salamah memberikan saran kepada Rasulullah saw pada peristiwa Hudaibiyah dan Perang Hunain.²⁷ Juga sebaliknya dikemukakan dalam sejarah Islam bahwasanya pada masa kenabian tidak pernah melibatkan wanita dalam percaturan politik. Nabi saw, tidak pernah mengajak wanita untuk berembuk/musyawarah untuk menentukan strategi perang. Dalam Islam setiap tindakan Nabi Muhammad saw adalah Sunnah, dan Sunnah tidak pernah memperkenankan kaum wanita terlibat secara langsung dalam bidang politik.

Islam memberikan kesempatan kepada kaum wanita untuk berkecimpung dalam kegiatan politik, ini jelas terlihat pada banyak ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini berlaku untuk segala macam kegiatan, tidak kecuali bidang politik dan kenegaraan.

Setidaknya ada dua kelompok yang memperdebatkan posisi wanita dalam memperoleh hak-hak politiknya. Pertama, kelompok yang melarang wanita menikmati hak-hak politiknya. Kedua, mereka yang menganjurkan hak politik wanita diperoleh secara wajar. Kelompok pertama ini menyakini bahwa Islam melarang wanita berkiprah dalam bidang politik dengan argumen sebagai berikut, Pertama, wanita berbeda dengan laki-laki dari sudut biologis, rasionalitas serta

²⁷ *Ibid*, hlm, 13

peradabannya.²⁸ Wanita dari sudut biologis merupakan makhluk yang lemah. Dari sudut rasionalitas, kelompok ini menganggap bahwa kaum wanita pada umumnya cenderung lebih mendahulukan emosi dan perasaannya daripada nalarnya. Kemudian dari sudut perkembangan peradaban, tampak dalam sejarah umat manusia, andil dan sumbangsih kaum wanita dalam membangun peradaban tidak begitu terlihat, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Bahkan biasa dikatakan bahwa peradaban merupakan kreasi utama makhluk laki-laki.²⁹

Oleh karena keterlibatannya yang tidak intensif pada tiga aspek di atas, wanita tidak diberi hak-hak politik. Apabila perempuan melakukan tugas-tugas politik, nanti akan berdampak negatif pada keluarga. Keterlibatan wanita dalam persoalan politik akan menjadi sebab keterpecahan pandangan politik dalam keluarga, misalnya sang suami memilih partai tertentu dan si isteri memilih partai yang berlainan dengan suaminya. Di sisi lain keterlibatan kaum wanita di luar rumah akan menyebabkan terjadinya krisis keluarga. Posisi wanita sebagai ibu mengharuskan menjaga anak-anak di rumah. Dalam pandangan kelompok ini, tugas utama seorang wanita adalah menjaga harmonitas dan moralitas keluarga di dalam rumah.

²⁸ Mutamakin, "Relasi Gender Dalam Pendidikan Islam" Ta'limuna. Vol.1, No. 2, September 2012, hlm. 124

²⁹ Mutamakin, "Relasi Gender Dalam Pendidikan Islam" TA'LIMUNA. Vol.1, No. 2, September 2012, hlm. 124

Kelompok kedua ini menganggap kebutuhan untuk menyetarakan kedudukan laki-laki dan wanita dalam mendapatkan hak-hak politiknya sebagai hal yang tidak bisa dihindarkan.³⁰ Demi kebaikan dan demokratisasi, mereka menghendaki wanita sejajar dengan laki-laki. Dalam kehidupan realitas sehari-hari, wanita merupakan separoh dari jumlah laki-laki atau bahkan lebih. Hal ini berarti wanita memiliki separoh potensi kebaikan yang ada di dunia ini. Inilah sekilas tentang wacana yang berkembang mengenai kedudukan wanita dalam politik.

C. Tinjauan Pustaka

Yusuf al-Qardhawi merupakan salah satu tokoh politik terkemuka pada keilmuan Islam. Sudah tidak perlu diragukan lagi karena tidak sedikit para sarjana terdahulu yang mengungkapkan penelitian dari pemikiran al-Qardhawi, dan juga mengenai tata kelola keuangan pemerintah dalam Islam yang telah dikaji sarjana ataupun tokoh muslim lainnya.

1. Penelitian berkenaan dengan hak politik perempuan telah dilaksanakan Nur Salim dengan judul “Kepemimpinan Politik Perempuan (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf al – Qardhawi dan Muhammad Shahrur), penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Muahmmad Syahrur tentang masalah kepemimpinan politik perempuan dengan menganalisa

³⁰ *Ibid*, hlm. 125

pendapat dan visi pemikiran yang dilakukan oleh kedua tokoh.

2. Penelitian berikutnya dilaksanakan oleh Zulkifli Hasan dengan judul "*Yusuf al-Qaradawi and Contribution of His Thoughts*" di dalam penelitiannya Zulkifli Hasan juga membahas tentang pemikiran al-Qardhawi tentang politik perempuan hanya sisipan saja bukan sebagai fokus penelitian beliau, sedangkan yang penulis fokuskan disini adalah tentang hak politik perempuan menurut al-Qardhawi.
3. Penelitian berikutnya dilaksanakan oleh Ai Sulastris dengan judul "Hak-Hak Politik Perempuan Menurut Pemikiran Yusuf al-Qardhawi" di dalam penelitiannya Ai Sulastris meneliti bagaimana pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang kepemimpinan perempuan. Sedangkan penulis meneliti dan membahas tentang hak politik perempuan.
4. Selanjutnya penelitian dilaksanakan oleh Yuni Harlina dengan judul "Hak Politik Perempuan dalam Islam". Yuni Harlina meneliti lebih luas bagaimana hak politik perempuan dalam islam, sedangkan penulis meneliti hak politik perempuan menurut al-Qardhawi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Budiarjo, Miriam. Partisipasi dan Partai Politik, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998).

_____, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 2003.

Djazuli. 2003. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Hasan, Farid Nu'man. "*Fiqh Perempuan Kontemporer*". Jakarta, Gema Insan

Ilyas, Yunahar. 1997. *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Qardhawi, Yusuf. 1995. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*. Jakarta : Gema Insani Press

_____. 1997. *Fikih Daulah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

_____. 1996. *Perempuan Dalam Pandangan Islam*, Bandung: Pustaka Setia

Sa'dawi, Amru Abdul Karim, *Wanita dalam Fikih Al-Qaradhawi*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009

Shihab, M. Quraish. Perempuan, Jakarta: Lentera Hati, 2006, Cet. III

Sumber Jurnal :

Aminy, Aisyah. 2006 "Peran Wanita dalam Kancah Politik", Makalah Seminar Sehari dalam Rangka Ulang Tahun Pondok Modern Gontor

B, Nurhayati. 2017. *Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Quran*. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol. 16, No. 2

- Hanapi,Agustin. 2015. *Peran Perempuan Dalam Islam*. Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies
- Haryani, Yanti. 2016. “Kontribusi Ajaran Islam Tentang Hak Politik Perempuan” dalam Mzahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol XV, No. 1
- Harlina,Yuni. 2015. *Hak Politik Perempuan Dalam Islam*. Marwah, Vol. XIV No. 1 Juni
- Mutamakin, Relasi Gender Dalam Pendidikan Islam, Ta’limuna. Vol.1, No. 2, September 2012
- Nasaruddin,Umar.2010. Argumen Kesetaraan Jender, Jakarta: Paramadina, Cet. II
- Parawansa, Khofifa Indar, *Hambatan terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia*
- Parlemen. 2006. *Hak Politik Perempuan*. Parlemen.net
- Suhendra, Ahmad, *Rekonstruksi Peran dan Hak Perempuan dalam Organisasi Masyarakat Islam*, Studi Gender dan Islam
- Sa'diyah,Dewi.2008. *Isu Perempuan*. Jurnal Ilmu Dakwah Vol 4 No. 12 Juli – Desember 2008
- Shihab,M.Quraish. 1996. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i, atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, Cet.III)
- Umar Fatima,Nafis. 2001. *Menggugat Sejarah Perempuan*, Jakarta:Cendekia Sentra Muslim, Penerbit CendekiaYusuf,Burhanuddin. 2018. Politik Dalam Islam: Makna, Tujuan Dan Falsafah (Kajian Atas Konsep Era Klasik). Jurnal Aqidah-Ta Vol. IV No. 1 Thn. 2018
- Zawawi,Abdullah. 2015. *Politik Dalam Pandangan Islam*. Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015

Sumber Internet :

Dewan Dakwah.or.id (2019 Oktober), “Peranan Wanita Dalam Islam”

(<https://dewandakwah.or.id/peranan-wanita-dalam-islam/>)

Febriana, Ika Kartika (2019, 18 Februari), *Salah Paham Atas Kebijakan Afirmatif bagi Perempuan*, <https://magdalene.co/story/salah-paham-atas-kebijakan-afirmatif-bagi-perempuan>

Mardzoeki, Faiza, (2019, 9 April), *Suara Perempuan dalam Panggung Politik Harus Hadir*, <https://magdalene.co/story/suara-perempuan-dalam-panggung-politik-harus-hadir>

<https://Kajian-isliah.blogspot.co.id/2009/02/perempuan-dan-hak-politik-dalam-06.html>, diakses pada tanggal 14 Juli 2019, pukul 9:49

